



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN

TAHUN 2025 - 2029

JLN. AHMAD YANI NO. 01 PRAYA. KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Website : pertanian.lomboktengahkab.go.id

Surel : distan@lomboktengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah merupakan upaya terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk meningkatkan potensi pertanian khususnya meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan maksud tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, penengakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme.

Renstra ini disusun sebagai arah dan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah dimana pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga berkontribusi dalam mendukung perekonomian.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Renstra ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tentunya renja ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kami sangat membutuhkan saran dan kritikan demi kesempurnaan Renstra Dinas Pertanian ini.

Praya, 07 Nopember 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lombok Tengah



I. MUHAMAD KAMRIN
NIP. 19651130 199203 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	21
2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	23
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	25
2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.2.2. Isu Strategis	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah	29
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.....	29
3.3 Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	31
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
4.1 Uraian Program.....	34
4.2 Uraian Kegiatan	34
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan	51
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 – 2029	76

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77
BAB V PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana Prasarana Dinas Pertanian	17
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024	18
Tabel 2.3 Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023.....	19
Tabel 2.4. Populasi Ternak Besar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023	19
Tabel 2.5. Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023	20
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian 2020-2025.....	20
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian	31
Tabel 3.2. Tahapan Renstra Dinas Pertanian.....	32
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian.....	33
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian.....	35
Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029	53
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah	77
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Stuktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 sebagai bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan sektor pertanian selama lima tahun, serta bersifat indikatif dan berfungsi sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan tahunan di lingkup Dinas Pertanian.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, yang memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan bidang pertanian diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, seiring dengan visi Kabupaten Lombok Tengah yaitu “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH).

Visi ini didukung oleh Misi daerah ke-3 yakni ” Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan” dimana arah kebijakan sektor Pertanian sesuai mandat RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 yakni perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian, penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, dan modernisasi pertanian dan irigasi berbasis teknologi.

Arah kebijakan tersebut telah menegaskan peran vital sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kontribusi signifikan sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya pada periode 2019 – 2024 sektor pertanian tercatat sebagai penyumbang tertinggi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 25,01% meningkat 6,37 % dari tahun sebelumnya. Posisi ini menegaskan bahwa pertanian tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh sosial dan budaya yang kuat di masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan sektor pertanian juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti menurunnya produktivitas lahan, belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan, dan skala usaha tani yang masih kecil dan kurang efisien. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani relatif masih rendah. Situasi ini menuntut adanya transformasi sektor pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim berbasis teknologi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi.

Dengan basis ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian, maka pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan menjadi tumpuan utama dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis agribisnis.

Tujuan utama pembangunan pertanian di periode ini adalah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, serta responsif terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi.

Berbagai program dan kebijakan strategis disusun sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai, serta inovasi teknologi menjadi kunci sukses pembangunan sektor ini ke depan. Sinergi dengan sektor lain seperti perikanan, kehutanan, dan infrastruktur menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

Merujuk pada uraian di atas, maka penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian 2025-2029 diharapkan memberikan arah dan acuan seluruh pemangku kepentingan sektor Pertanian yang nantinya akan diturunkan lebih operasional ke dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah Dinas Pertanian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan termasuk urusan kelautan dan perikanan sebagai urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 25 thn 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pumutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/PERMEN- KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, tanggal 11 Februari 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045,
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2030;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017)
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 92 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 (akan dimutakhirkan sesuai penetapan).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya tujuan tersusunnya Renstra:

- a. Menyusun arah pembangunan jangka menengah sektor pertanian yang meliputi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator kinerja sesuai dengan kewenangan dan urusan Dinas Pertanian;
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan;
- c. Mewujudkan sinergi dan integrasi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan pertanian di tingkat daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan antar wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- d. Memberikan panduan operasional dalam pengelolaan sumber daya secara optimal di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan masing-masing unit kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat :
 - a. Tugas, Fungsi dan struktur PD
 - b. Sumberdaya Perangkat Daerah

- c. Kinerja Pelayanan PD
 - d. Kelompok Sasaran layanan
 - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
2. Permasalahan dan Isue strategis Perangkat Daerah, memuat:
- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isue Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuandan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta output kinerja dan indikator
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama PD
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

1. memuat tulisan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentuk Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan ini merupakan hasil penggabungan beberapa instansi yang sebelumnya menangani urusan pertanian secara terpisah, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Mengacu pada pembagian kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memperoleh kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi sub urusan pertanian tanaman pangan, sub urusan peternakan, sub urusan perkebunan, sub urusan hortikultura, sub urusan penyuluhan, serta sub urusan sarana dan prasarana pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menyediakan berbagai jenis pelayanan untuk mendukung sektor pertanian. Pelayanan yang diberikan mencakup penyediaan informasi dan dokumentasi terkait pertanian, serta pelayanan administratif berupa perizinan usaha dan pengesahan kelembagaan tani.

Di bidang teknis, pelayanan meliputi jasa laboratorium dan medik veteriner yang berperan dalam mendukung diagnosis penyakit hewan serta pengujian kualitas pakan ternak. Pelayanan ini diperkuat dengan kegiatan kesehatan hewan, khususnya optimalisasi vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan pelaksanaan program pencegahan penyakit menular strategis lainnya. Untuk mendukung peningkatan populasi dan mutu genetik, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah juga menyelenggarakan pelayanan reproduksi terpadu melalui inseminasi buatan (IB) dan identifikasi sapi betina produktif yang telah berhasil meningkatkan angka kelahiran dan efisiensi usaha peternakan rakyat.

Di samping itu, tersedia juga pelayanan penyediaan dan peredaran benih atau bibit ternak serta hijauan pakan ternak (HPT) untuk memastikan ketersediaan sarana produksi peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai

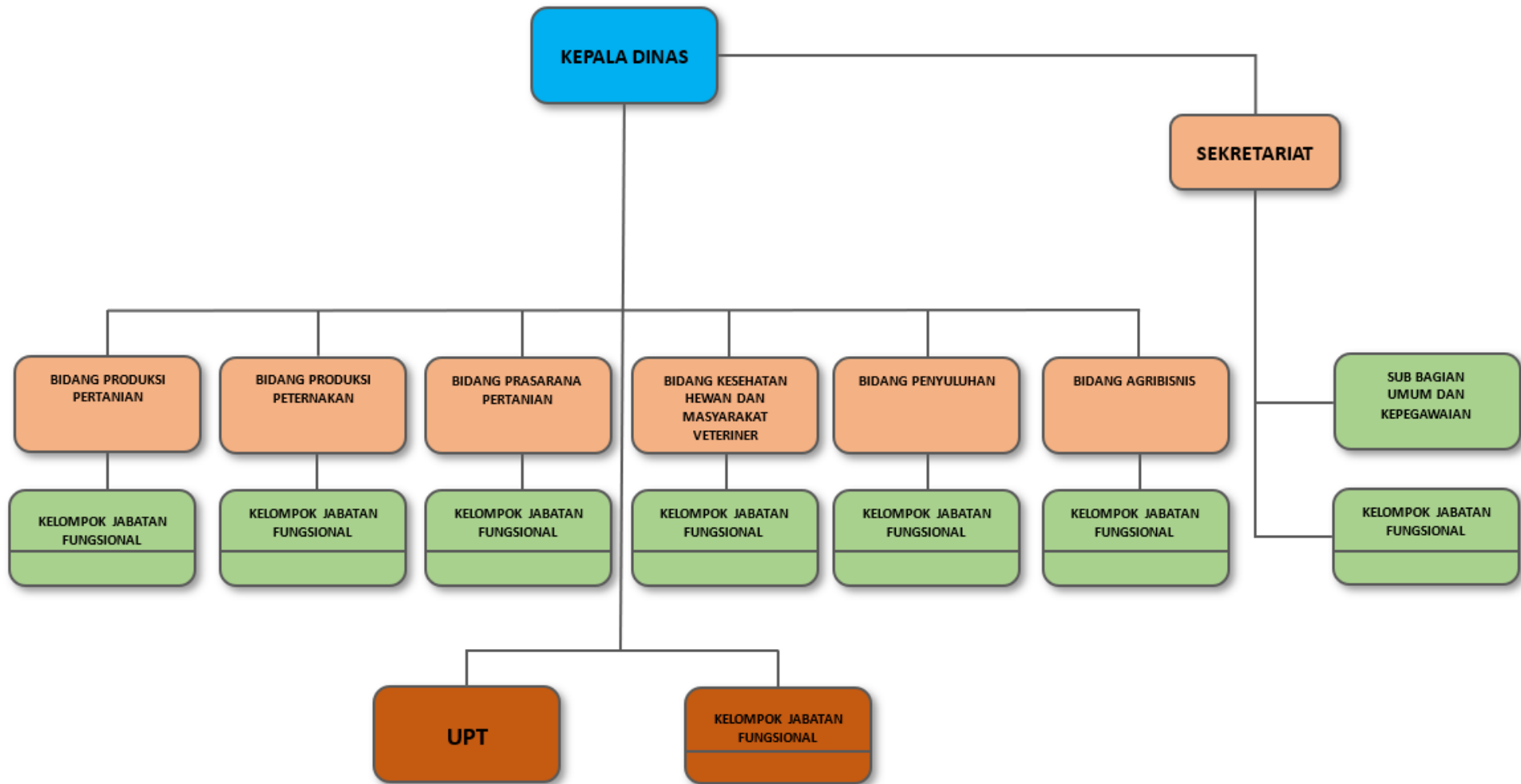
pendukung dari berbagai upaya teknis tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah juga menyelenggarakan pelayanan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja dinas;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
4. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
6. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pengkoordinasian kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik;
8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait;
9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Gambar 2. 1 Stuktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah



Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Unsur Pelaksanaan adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Prasarana Pertanian membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Produksi Pertanian membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Produksi Peternakan membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Agribisnis membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Penyuluhan membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan penggabungan dari beberapa dinas yang melaksanakan urusan pertanian, Seperti Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Serta Badan Penyelenggara Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah terkait dengan urusan pertanian yang mencakup Sub Urusan Pertanian Tanaman Pangan, Urusan Peternakan, Urusan Perkebunan, Urusan Hortikultura, Urusan Penyuluhan Dan Urusan Sarana Prasarana Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 84 tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah,

- a. Kepala Dinas:

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pertanian. dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepala dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan di bidang produksi pertanian, prasarana pertanian, Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, serta bidang penyuluhan dan perizinan usaha pertanian;
 2. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 3. Pengembangan prasaran pertanian;
 4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 6. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
 7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 11. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian;
 12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 13. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Sekretariat:
1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup dinas;
 2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja dinas;
 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup dinas;
 4. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
 5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 6. Pengkoordinasian kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin Kerjasama yang baik;
 7. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;

8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 9. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan:
1. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja sub bagian;
 2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 3. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup dinas;
 4. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 5. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas dinas;
 7. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
 9. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
 10. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pemuatan daftar gaji serta tunjangan aparatur sipil negara (ASN)
 11. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pemegang Kas (PPK, PPTK);
 12. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas;
 14. Pelaksanaan inventarisasi asset dan pengelolaan tata usaha barang lingkup dinas;
 15. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
 16. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpanan barang;

17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian;
 18. Pelaksanaan tugas tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Bidang Produksi Pertanian:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program kerja seksi lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang di Bidang Produksi Pertanian;
 3. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Bidang Produksi Pertanian;
 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Produksi Pertanian;
 5. Pengkoordinasian pelaksana tugas Bidang Produksi Pertanian;
 6. Penyusunan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas di Bidang Produksi Pertanian;
 7. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis pertanian dalam bidang produksi pertanian;
 8. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi usaha pertanian dan pengkoordinasian dengan bidang lain;
 9. Penyiapan bahan pelaporan tugas dinas di bidang produksi pertanian;
 10. Pengkajian bahan Kerjasama dengan pihak lain di Bidang Produksi pertanian;
 11. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas dengan bidang tugasnya;
- e. Bidang Produksi peternakan:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program kerja seksi lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang di Bidang Produksi Peternakan;
 3. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di Bidang Produksi Peternakan;
 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Produksi Peternakan;
 5. Pengkoordinasian pelaksana tugas Bidang Produksi Peternakan;
 6. Penyusunan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas di Bidang Produksi Peternakan;

7. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis Peternakan dalam bidang produksi Peternakan;
 8. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi usaha Peternakan dan pengkoordinasian dengan bidang lain;
 9. Penyiapan bahan pelaporan tugas dinas di bidang produksi Peternakan;
 10. Pengkajian bahan Kerjasama dengan pihak lain di Bidang Produksi Peternakan;
 11. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas dengan bidang tugasnya;
- f. Bidang Prasarana Pertanian:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program kerja seksi lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang prasarana pertanian;
 3. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di bidang prasarana pertanian;
 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang prasarana pertanian;
 5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang prasarana pertanian;
 6. Penyusunan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas dibidang prasarana pertanian;
 7. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis dibidang prasarana pertanian;
 8. Penyiapan bahan pelaporan tugas dinas dibidang prasarana pertanian;
 9. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program kerja seksi lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;
 3. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
 4. Pengawasan obat hewan;
 5. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 6. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner;

7. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 8. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Bidang Penyuluhan:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA dan Program Kerja Seksi Lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
 3. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan di bidang;
 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang;
 5. Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang penyuluhan;
 7. Penyusunan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas dibidang penyuluh;
 8. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis penyuluh;
 9. Penyiapan bahan pelaporan tugas dinas dibidang penyuluh;
 10. Pengkajian bahan Kerjasama dengan pihak lain dibidang penyuluh;
 11. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Bidang Agribisnis:
1. Pengkoordinasian penyusunan RKA, DPA, dan program kerja seksi lingkup bidang;
 2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang agribisnis;
 3. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan lingkup bidang;
 4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis lingkup bidang;
 5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang agribisnis;
 6. Penyusunan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas dibidang agribisnis;
 7. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis agribisnis;
 8. Penyiapan bahan pelaporan tugas dinas dibidang agribisnis;
 9. Pengkajian bahan Kerjasama dengan pihak lain dibidang agribisnis;
 10. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Kelompok Jabatan Fungsional:

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan jabatan fungsional ke dalam unit kerja lingkup dinas, dan pembagian tugas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala dinas;

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh 294 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah PNS menurut jabatan yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 294 orang terdiri dari:

a. Eselon II.a	: 1 orang
b. Eselon III.b	: 6 orang
c. Eselon IV.a	: 11 orang
d. Eselon IV.b	: 10 orang
e. Fungsional Umum	: 52 orang
f. Fungsional Tertentu:	
• Perencana	: 1 orang
• Penyuluh Pertanian	: 104 orang
• POPT (Petugas Organisme Pengganggu Tenaman)	: 12 orang
• Pengawas Benih Tanaman	: 6 orang
• Medik Veteriner	: 9 orang
• Paramedik Veteriner	: 19 orang
• Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian	
• PPPK Penyuluh Pertanian	: 1 orang
• PPPK Paramedik Veteriner	: 45 orang
• PPPK Pengawas Bibit Peternakan	: 10 orang
	: 6 orang

2. Jumlah Pegawai sesuai dengan Golongan sebagai berikut:

- a. Golongan IV : 32 orang
- b. Golongan III : 142 orang
- c. Golongan II : 45 orang
- d. Golongan I : 1 orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

- a. SD : 1 orang
- b. SLTP : -
- c. SLTA : 99 orang
- d. DIII : 24 orang
- e. S1 : 156 orang
- f. Dokter Hewan : 10 orang
- g. S2 : 14 orang

4. Jumlah Jabatan Struktural sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III.a : 1 orang
- c. Eselon III.b : 6 orang
- d. Eselon IV.a : 11 orang
- e. Eselon IV.b : 10 orang

Sementara itu Sumberdaya Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Dinas Pertanian

No	Jenis Aset	Perkiraan Nilai (Rp)	Unit Kerja Yang Menggunakan/Menguasai Aset (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
A	Aset Tetap	Rp 101.779.120.837,25	
1	Aset Tanah	Rp 16.944.786.000,45	Sekretariat
2	Aset Gedung dan Bangunan	Rp 18.338.863.000,98	Sekretariat
3	Aset Jalan dan Jaringan Irigasi	Rp 50.012.521.000,76	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
4	Aset Peralatan dan Mesin	Rp 16.474.116.000,46	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 8.834.834.600,00	Bidang Peternakan

Sumber : Dinas Pertanian Lombok Tengah, 2025

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan sektor pertanian kepada masyarakat, yang diukur dari berbagai indikator kinerja.

Dinas Pertanian telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021 – 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD, adapun capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024 terdiri dari satu sasaran yang merupakan indikator kunci yaitu “Terwujudnya peningkatan produksi pertanian” yang di ukur dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pertanian;
2. Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura;
3. Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan
4. Peningkatan Produksi/Populasi Ternak

Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian tersebut sepanjang Tahun 2021-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi (%)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase		4.24	4.83	4.45	4.48	20.04	4.17	4.57	1.03
1	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Persentase		2.06	2.12	2.18	2.24	9.14	2.56	2.58	-0.34
2	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase		2.91	3.00	3.09	3.19	-0.95	3.21	3.34	-0.28
3	Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Persentase		10.01	10.31	10.62	10.94	71.61	9.26	11.02	-0.55
4	Peningkatan Populasi Ternak	Persentase		1.96	1.90	2.00	1.98	0.34	1.63	1.33	5.30

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan bentuk kewajiban lembaga pemerintah untuk memberikan laporan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini disampaikan secara berkala dan sistematis melalui instrumen evaluasi kinerja. Evaluasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja, yaitu alat ukur yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

Berdasarkan data dan informasi yang tersaji dalam tabel 2.2 di atas, maka berikut ini disajikan gambaran umum mengenai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Indikator utama peningkatan produksi pertanian mengalami fluktuasi signifikan, dengan realisasi jauh di bawah target, terutama pada tahun 2024 yang hanya mencapai 1,03% dari target 4,48%.
2. Capaian evaluasi kinerja tujuan strategis mencapai predikat baik, dengan capaian tertinggi terdapat pada indikator “persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura”. Pada tahun 2023, indikator ini berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 11,02% dari target 10,49% dan menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Sebaran capaian sasaran strategis pada umumnya menunjukkan tren positif terutama pada indikator produksi tanaman pangan dan perkebunan yang berhasil melampaui target pada tahun 2023.
4. Capaian indikator peningkatan populasi ternak masih belum optimal dan belum mampu mencapai target selama dua tahun berturut-turut, sehingga masih mendapatkan predikat kurang.
5. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan pertanian ke depan, terutama dalam menjaga konsistensi antara target dan realisasi di semua sektor.

Tabel 2. 3 Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Komoditi	Tahun					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi (Ton)	509,914	499,071	493,709	500,135	514,584	506,125
2	Jagung (Ton)	71,967	63,914	63,945	88,153	81,678	68,441
3	Kedelai (Ton)	13,502	8,050	6,655	8,519	12,337	11,283
4	Melon (Kw)	26,932	27,876	20,332	23,392	-	24,922
5	Tembakau Virginia (Ton)	19,896	20,224	11,251	21,721	-	17,608
6	Tembakau Rajangan/Rakyat (Ton)	924	707	599	418	-	667

Produksi komoditas unggulan pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023 menunjukkan dinamika yang beragam antar komoditas. Produksi padi cenderung stabil dan mengalami sedikit peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023. Jagung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan lonjakan produksi pada tahun 2022. Produksi kedelai menurun pada tahun 2021 dan pulih kembali pada tahun 2023. Sementara itu, produksi tembakau virginia dan tembakau rajangan/rakyat menunjukkan penurunan tahun 2021. Secara keseluruhan, variasi dalam capaian ini menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis maupun eksternal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi penguatan produksi komoditas unggulan pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 4. Populasi Ternak Besar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	176,982	179,189	182,773	173,303	177,071
2	Kerbau	21,545	21,772	21,926	18,128	14,955
3	Kuda	1,845	1,567	1,661	NA	575

Populasi ternak besar di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023 menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar jenis ternak. Populasi sapi mengalami dinamika relatif stabil pada tahun 2019 – 2021, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022. Populasi kerbau cenderung menurun, menunjukkan penurunan signifikan terutama sejak tahun 2021. Sementara itu, populasi kuda juga mengalami penurunan cukup tajam. Dinamika penurunan pada beberapa jenis ternak besar ini mengindikasikan perlunya perhatian dan penguatan kebijakan serta program pendukung, baik dari sisi pembibitan, penyediaan pakan, maupun pengelolaan peternakan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan populasi ternak.

Tabel 2. 5. Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tanaman	Tahun					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tembakau Virginia (Ton)	19,896	20,224	11,251	21,721	-	17,608
2	Tembakau Rajangan/Rakyat (Ton)	924	707	599	418	-	667

Produksi komoditas utama perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi yang signifikan. Produksi tembakau virginia mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022. Sementara itu, produksi tembakau rajangan/rakyat menunjukkan pola penurunan bertahap hingga tahun 2022. Perubahan produksi ini mencerminkan kondisi yang belum stabil.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian 2020-2025

TAHUN	APBD	BELANJA PEGAWAI	BELANJA NON PEGAWAI
2021	54.976.824.200,00	30.388.909.111,00	24.587.915.089,00
2022	75.643.633.197,00	30.646.794.299,00	44.996.838.898,00
2023	64.352.690.706,00	29.437.388.325,00	34.915.302.381,00
2024	102.022.815.366,00	29.665.738.377,00	72.357.076.989,00
2025	76.066.436.909,94	30.362.069.450,94	45.704.367.459,00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Renstra Dinas Pertanian Lombok Tengah adalah berbagai pihak yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas tersebut. Kelompok sasaran ini meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, organisasi petani, pelaku usaha pertanian, dan masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian.

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dalam Rencana Strategis:

- **Petani:**
Individu yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam, beternak.
- **Petani Milenial:**
Generasi muda yang berusia produktif dan memiliki ketertarikan serta keterlibatan aktif dalam kegiatan pertanian dengan pendekatan berbasis teknologi, inovasi, dan kewirausahaan.
- **Kelompok Tani:**
Kumpulan petani yang bekerja sama dalam suatu wilayah untuk mencapai tujuan bersama di bidang pertanian.
- **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan):**
Organisasi yang menaungi beberapa kelompok tani, berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengembangan pertanian di tingkat yang lebih luas.
- **Organisasi Petani:**
Lembaga yang mewakili kepentingan petani secara keseluruhan, seperti asosiasi petani atau koperasi petani.
- **Pelaku Usaha Pertanian:**
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertanian di luar petani, seperti pedagang hasil pertanian, pengusaha pengolahan hasil pertanian, dan penyedia jasa pertanian.
- **Masyarakat Umum:**
Seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan dan informasi terkait sektor pertanian, seperti informasi mengenai ketersediaan pangan, harga produk pertanian, dan program-program pemerintah di bidang pertanian.

Tujuan Kelompok Sasaran:

- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
- Meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian.
- Mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang cukup.
- Meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
- Memajukan sektor pertanian secara keseluruhan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian Lombok Tengah, mencakup berbagai pihak yang bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada petani dan sektor pertanian secara keseluruhan. Mitra ini terdiri atas kelompok tani

(Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), penyuluh pertanian, lembaga penelitian dan pengembangan pertanian, organisasi non pemerintah (NGO), serta pihak swasta yang bergerak di bidang pertanian.

Adapun tujuan dari kemitraan ini antara lain: meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan, mendorong inovasi dan adopsi teknologi pertanian, memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan, dan mendukung pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan.

Berikut di bawah ini dapat dijabarkan peran dan fungsi mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan:

- Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan):

Sebagai wadah petani, Poktan dan Gapoktan memfasilitasi kegiatan pertanian, distribusi informasi, akses modal, serta pemasaran hasil pertanian.

- Penyuluh Pertanian:

Bertugas memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait teknologi pertanian, praktik budidaya yang baik, manajemen usaha, serta pengelolaan sumber daya alam.

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian:

Berperan dalam menghasilkan inovasi teknologi pertanian, varietas unggul, serta metode pengendalian hama dan penyakit yang efektif.

- Pihak Swasta:

Meliputi perusahaan penyedia sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian, serta pelaku usaha pengolahan hasil pertanian yang berkontribusi dalam penyediaan kebutuhan petani dan pemasaran hasil pertanian.

Beberapa contoh kemitraan kongkrit yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah:

- Dinas Pertanian bekerja sama dengan Poktan untuk menyelenggarakan pelatihan budidaya padi organik.
- Dinas Pertanian bekerja sama dengan Gapoktan untuk membangun jaringan pemasaran hasil panen petani.
- Dinas Pertanian bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan varietas unggul padi tahan kekeringan.
- Dinas Pertanian bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani.

Dengan adanya kemitraan yang solid antara Dinas Pertanian dan berbagai pihak terkait, pelayanan kepada petani dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga sektor pertanian dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah

2.1.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Selama periode 2021-2024, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah telah membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan sektor pertanian, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Bentuk kerjasama antara Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Lombok Tengah berfokus pada optimasi lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan pertanian. Kerjasama ini mencakup penandatanganan kontrak survey, investigasi, dan desain kegiatan optimasi lahan.

Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang lebih rinci:

a. Optimasi Lahan:

Dinas PUPR mendukung Dinas Pertanian dalam penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk mengoptimalkan lahan pertanian non rawa, seperti irigasi dan drainase.

b. Pengembangan Komoditas Pertanian Strategis:

Kedua dinas bekerja sama untuk mengembangkan komoditas pertanian unggulan di Lombok Tengah, termasuk komoditas berbasis agribisnis dan wilayah.

c. Revitalisasi Penyuluhan:

Dinas Pertanian dan Dinas PUPR juga bekerja sama dalam revitalisasi program penyuluhan pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

2. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Tengah menjalin kerjasama dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bentuk kerjasamanya meliputi optimasi lahan, gerakan tanam padi bersama, serta koordinasi dalam program strategis nasional, termasuk pengawasan produksi dan distribusi pangan.

Berikut beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan:

a. Koordinasi Program Strategis Nasional:

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan terlibat dalam koordinasi program strategis nasional terkait ketahanan pangan, termasuk pengawasan produksi dan distribusi padi serta jagung, serta implementasi program Makan Bergizi.

b. Pengembangan Komoditas Unggulan:

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dalam pengembangan komoditas pertanian strategis dan unggulan berbasis wilayah, serta revitalisasi penyuluhan dan edukasi pertanian.

c. Sinergi Lintas Sektor:

Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan juga menjalin sinergi dengan berbagai sektor lain, seperti kepolisian dan Badan Wilayah Sungai (BWS) NTB, untuk menyusun strategi pelaksanaan yang lebih terintegrasi dalam mewujudkan program ketahanan pangan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kerjasama antara Dinas Pertanian Lombok Tengah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah difokuskan pada beberapa hal, termasuk pengembangan produk pertanian lokal, peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan pemasaran produk pertanian. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang lebih rinci:

a. Pengembangan Komoditas Pertanian Strategis:

- Identifikasi dan Pengembangan Komoditas Unggulan:

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan bersama-sama mengidentifikasi komoditas pertanian yang memiliki potensi pasar tinggi di Lombok Tengah.

- Pengembangan Sistem Agribisnis:

Bekerja sama dalam membangun sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk budidaya, pengolahan, pemasaran, dan distribusi.

- Revitalisasi Penyuluhan:

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan bersinergi dalam memberikan penyuluhan kepada petani mengenai praktik pertanian modern, diversifikasi produk, dan peningkatan kualitas hasil panen.

b. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian:

- Pengembangan Produk Olahan:

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan bekerja sama dalam pengembangan produk olahan dari komoditas pertanian lokal, sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.

- Pemasaran dan Promosi:

Dinas Perdagangan membantu Dinas Pertanian dalam memasarkan produk pertanian, baik secara lokal maupun nasional, serta melakukan promosi untuk meningkatkan daya saing produk.

- Peningkatan Kualitas Produk:

Dinas Pertanian fokus pada peningkatan kualitas produk pertanian, sementara Dinas Perdagangan membantu dalam memastikan produk tersebut memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar.

- Pemantauan Ketersediaan Pupuk:

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dalam pengawasan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, untuk memastikan ketersediaan dan penyalurannya tepat sasaran bagi petani. Kerjasama ini melibatkan pemantauan ketersediaan pupuk di tingkat distributor dan pengecer, serta memastikan penyaluran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan rekomendasi Tim Satgasus.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki kerjasama dalam berbagai bidang terkait pertanian berkelanjutan dan

pelestarian lingkungan. Kerjasama ini mencakup pengelolaan sampah organik untuk pupuk, pengembangan pertanian pro-organik, dan program agroforestri untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil meningkatkan produktivitas pertanian.

Contoh Kerjasama yang telah dilaksanakan seperti:

- Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah pernah berpartisipasi dalam kegiatan penanaman serentak agroforestri pangan yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.
- Dinas Pertanian Lombok Tengah secara aktif menyelenggarakan pelatihan pertanian pro-organik, yang juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah organik.

5. Biro Pusat Statistik.

Dinas Pertanian Lombok Tengah bekerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Lombok Tengah dalam beberapa kegiatan, terutama terkait sensus pertanian. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data pertanian di Lombok Tengah demi perencanaan dan evaluasi pembangunan sektor pertanian yang lebih baik.

Beberapa contoh kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pertanian dan BPS Lombok Tengah seperti:

a. Ground check sensus pertanian 2023.

BPS dan Dinas Kominfo Lombok Tengah melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengecek keakuratan data sensus pertanian, termasuk verifikasi nama-nama kepala keluarga yang mengusahakan pertanian di setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau dusun.

b. Pelatihan sensus pertanian.

BPS Lombok Tengah menyelenggarakan pelatihan sensus pertanian yang diikuti oleh para profesional dan ahli di bidang pertanian. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk menghasilkan data statistik pertanian yang akurat dan lengkap sebagai dasar dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor pertanian di Lombok Tengah. Dengan data yang akurat, diharapkan solusi yang lebih baik dan efisien dapat ditemukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian di wilayah tersebut.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, Dinas Pertanian menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor pertanian. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Menurunnya produktifitas lahan pertanian;

Adapun penyebab terjadinya permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Pada Musim Hujan (MH) dan Musim Tanam (MT) 1 tahun 2024 kondisi iklim dengan kemarau panjang (El Nino) menyebabkan curah hujan dari hari ke

hari semakin berkurang, sehingga pertumbuhan pertanaman menjadi tidak maksimal;

- b. Khusus tanaman padi ladang, dari total padi ladang yang ditargetkan hanya mencapai 52,39% dan banyak yang mengalami gagal tanam.

Penurunan produktifitas lahan dan tanaman pertanian tersebut merupakan dampak dari adanya perubahan iklim yang signifikan berpengaruh pada sektor pertanian di Lombok Tengah. Dampak lain yang muncul seperti perubahan pola tanam, penyakit hama tanaman, menurunnya kualitas tanah dan peningkatan risiko gagal panen.

Bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga mengancam lahan pertanian, merusak infrastruktur irigasi, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani.

2. Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan;

Lahan pertanian mengalami penyusutan akibat alih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan industri, sehingga memberikan dampak kepada tingkat ketahanan daerah terhadap bencana, jasa ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Peningkatan jumlah *grey infrastructure* secara pesat dapat memperbesar risiko bencana karena tingginya kepadatan bangunan turut meningkatkan tingkat kerentanan wilayah. Dalam konteks ini, kawasan pertanian memiliki peran penting sebagai penyedia jasa ekosistem yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi permukiman dan industri di Kabupaten Lombok Tengah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan sektor pertanian. Meskipun sebagian wilayah masih tergolong tinggi dan sedang dalam daya dukung jasa ekosistem pangan, kecenderungan alih fungsi lahan di wilayah kategori sedang perlu dikendalikan. Jika tidak ditangani secara tepat, alih fungsi ini dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan lahan untuk produksi pangan, meningkatnya risiko bencana ekologis, serta hilangnya fungsi lingkungan dari lahan pertanian sebagai penyerap air dan pengatur iklim mikro. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 52.957,17 Ha yang telah ditetapkan, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

3. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah mengalami tren penurunan meskipun masih menjadi penggerak utama dan basis perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan nilai tambah produk pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi peran sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, penguatan agribisnis, dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Masih rendahnya Tingkat kesejahteraan petani;

Pendapatan petani masih belum stabil dengan akses terbatas terhadap modal, teknologi pertanian, dan pasar yang kompetitif. Kelembagaan petani belum optimal dalam mendukung penguatan kapasitas dan daya saing. Hal ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sebagian besar petani masih berada pada kategori rumah tangga usaha tani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, informasi pasar, dan perlindungan harga. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani, serta turun menurunnya minat generasi muda untuk terlibat di sektor pertanian.

5. Usaha peternakan ternak besar masih pada tingkat skala kecil.

Pengembangan peternakan diarahkan pada penguatan kelembagaan peternak, konsolidasi usaha melalui klaster kawasan peternakan, penyediaan akses terhadap pakan, modal serta teknologi, dan mendorong kemitraan antara peternak dan pelaku usaha.

Usaha peternakan khususnya ternak besar seperti sapi masih didominasi oleh sistem pemeliharaan tradisional dalam skala rumah tangga. Kondisi ini menghambat efisiensi produksi, kualitas genetik ternak, dan kontinuitas pasokan. Skala usaha yang kecil juga menyulitkan peternak mengakses pembiayaan, pasar, serta layanan teknis secara maksimal.

2.2.2. Isu Strategis

Rumusan permasalahan tersebut di atas tidak terlepas dari pengaruh isu-isu yang muncul dari berbagai aspek yang telah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun identifikasi isu sesuai lingkungan dinamis yang diperkirakan tetap relevan di masa mendatang yang perlu menjadi fokus perhatian pelayanan Dinas Pertanian yakni sebagai berikut:

1. Isu KLHS yang relevan, seperti:
 - Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi lahan permukiman
2. Isu Lingkungan Dinamis yang relevan:
 - a. Isu Global, seperti:
 - Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
 - Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Krisis Air dan Efisiensi Irigasi
 - Penurunan Minat Generasi Muda terhadap Pertanian
 - Keamanan dan Kesehatan Pangan
 - b. Isu Nasional, seperti:
 - Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
 - Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Ketergantungan terhadap pupuk Kimia
 - Modernisasi Pertanian
 - Regenerasi Petani
 - c. Isu Regional, seperti:
 - Perubahan Iklim
 - Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Ketergantungan terhadap pupuk Kimia
 - Modernisasi Pertanian
 - Regenerasi Petani

Berdasarkan identifikasi isu-isu sesuai lingkungan dinamis di atas, maka dapat dideskripsikan 5 (lima) isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam**
- 2. Alih Fungsi Lahan**
- 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi**
- 4. Pengelolaan sumber daya alam**
- 5. Pengembangan teknologi pertanian**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan merupakan arah strategis jangka menengah yang hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Sejalan dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Tujuan Renstra Dinas Pertanian disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat serta memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029. Dalam konteks tersebut, tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya produktivitas pertanian".

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan pada level menengah. Perumusan sasaran ini harus memiliki kemampuan untuk dapat diukur sebagai bentuk penilaian atas pencapaian atau tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan kemudian.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, serta relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan rumusan tujuan di atas dapat ditegaskan sasaran pembangunan sektor pertanian yang hendak dituju oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 yakni: "Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian."

Dengan adanya penegasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 maka indikator, baseline dan target yang ditetapkan ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Meningkatnya Produktifitas Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	6,14	7,65	8,64	9,00	9,11	10,43	
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

3.3 Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah rencana tindakan-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pertanian 2025-2029.

Untuk mewujudkan Strategi dimaksud maka telah dilakukan penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029, dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi Produksi dan Modernisasi	Hilirisasi, Nilai Tambah dan Pasar	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Petani	Evaluasi, Konsolidasi dan Keberlanjutan
Tujuan :	Tujuan :	Tujuan :	Tujuan :	Tujuan :
Menyiapkan fondasi pelaksanaan program dan validasi data sektoral	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.	Mendorong penguatan hilirisasi dan rantai nilai	Mendorong petani dan kelembagaannya menjadi mandiri dan tangguh.	Mengukur capaian RENSTRA dan menyusun fondasi keberlanjutan.
Fokus :	Fokus :	Fokus :	Fokus :	Fokus :
Penyusunan baseline data (produksi, SDM, sarpras).	Modernisasi pertanian (Alsintan, digitalisasi, irigasi efisien).	Pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk petani.	Regenerasi petani melalui pelatihan, petani milenial, dan inkubasi usaha.	Evaluasi capaian indikator kinerja RENSTRA dan RPJMD.
Validasi data petani, kelembagaan, dan lahan.	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan (hortikultura, peternakan, tembakau).	Penguatan Badan Usaha Milik Petani (BUMDes, Kelembagaan Ekonomi Petani).	Penguatan kelembagaan penyuluhan, poktan, dan Gapoktan.	Penyusunan rancangan RENSTRA berikutnya.
Konsolidasi program nasional (Kementan, Bappenas, Pemprov).	Percepatan adopsi inovasi dan pemanfaatan teknologi.	Branding produk unggulan lokal dan peningkatan daya saing.	Peningkatan akses pembiayaan (KUR, asuransi AOTP/AUTS).	Penguatan inovasi yang berhasil dan replikasi ke wilayah lain.
Penguatan koordinasi antar-OPD dan kelembagaan tani.				
Program Strategis :	Program Strategis:	Program Strategis:	Program Strategis:	Program Strategis:
Updating Simluhtan, e-RDKK, e-Alokasi.	Perluasan areal tanam (PAT), intensifikasi pertanian.	Penguatan RMU, penggilingan, cold storage, dan gudang.	Inkubasi petani milenial.	Evaluasi menyeluruh IKU/IKD Dinas Pertanian.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan BPP Kostratani.	Bantuan Alsintan, UPPO, pupuk organik, pengendalian OPT.	Fasilitasi sertifikasi GAP, halal, dan keamanan pangan.	Transformasi digital kelembagaan tani.	Dokumentasi praktik baik (best practices) dan inovasi.
Revitalisasi LP2B dan penguatan perda perlindungan petani.	Penerapan inovasi daerah (Tali Tani, TrioMelon, Posyandu Ternak, dll).	Ekspansi kemitraan agribisnis dan promosi digital.	Penyusunan RDKK mandiri dan database kelembagaan berbasis aplikasi.	Pelatihan kader pertanian dan regenerasi kelembagaan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis yang konsisten, terarah,serta mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra secara berkelanjutan.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN	KET
1	2	3	4	5
1	Integrasi dalam Perencanaan	Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
2	Penyusunan dan Implementasi Program	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	
3	Penguatan SDM dan Penyuluhan	Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian	Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian	
4	Pengawasan dan Evaluasi	Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Mendorong Produktivitas Sektor Pertanian	Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Mendorong Produktivitas Sektor Pertanian	
		Modernisasi Pertanian dan Irigasi Berbasis Teknologi	Modernisasi Pertanian dan Irigasi Berbasis Teknologi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, telah dirumuskan sejumlah program dan kegiatan yang akan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Program dan kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Program dan kegiatan ini dirancang sebagai acuan pelaksanaan kegiatan serta pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian pada periode mendatang. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

4.1 Uraian Program

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Perizinan Usaha Pertanian
6. Penyuluhan Pertanian
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`

4.2 Uraian Kegiatan

Adapun kegiatan merupakan penjabaran dari uraian masing-masing program yang telah disebutkan di atas, yakni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN								
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya produktivitas pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)			
					Peningkatan Produksi Pertanian (%)			
		Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian				1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
						2. Peningkatan Produksi Hortikultura		
						3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
						4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan		
						Jumlah Sarana Pertanian yang diawasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian								
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih Terkendali dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Persentase Kelompok Peternak yang terlayani Bibit dan Pakan Ternak Berkualitas Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Lus Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi KP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Cakupan Luas Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Prasarana Pembangunan	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun, direhab dan dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terehabilitasi dan terpeliharanya	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>jaringan irigasi usaha tani</p> <p>Terdatanya jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terawasinya penerapan persyaratan teknis</p>	<p>1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</p> <p>2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)</p> <p>1. Jumlah ternak (Besar, Kecil dan Unggas) yang masuk dari Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>2. Jumlah ternak (Besar, Kecil dan Unggas) yang keluar dari Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>3. Jumlah produk Bahan Pangan Asal Hewan yng masuk di Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>4. Jumlah produk Bahan Pangan Asal Hewan yang keluar di Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis</p>	<p>Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Cakupan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
					2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
				Terlaksananya Penanganan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
			Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
					Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	Perizinan Usaha Pertanian		
					Terlaksananya penerbitan Rekomendasi Teknis Pendukung Usaha Pertanian sesuai SOP	Jumlah rekomendasi teknis pendukung usaha pertanian sesuai SOP yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Penyuluhan Pertanian	
					2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan Beroperasi		
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah kegiatan penyuluhan yaang dilaksanakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					2. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan layanan penyuluhan		
					3. Jumlah petani yang terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan		
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Penyuluhan Pertanian				
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		Nilai SAKIP PD		
						Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Perubahan DPA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

Berikut di bawah ini merupakan uraian kegiatan dari masing-masing program berdasarkan tabel diatas:

1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan penggunaan sarana pertanian

2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan prasarana pertanian
- Pembangunan Prasarana Pertanian

3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah
- Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah

4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

5. Perizinan Usaha Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah

6. Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyuluhan pertanian

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pendanaan

Setiap sasaran diturunkan ke dalam program dan kegiatan/subkegiatan yang menghasilkan output dan outcome, yang kemudian diukur melalui indikator yang telah ditentukan.

Indikator ini disajikan bersama satuan pengukuran, data baseline tahun 2024 sebagai titik awal capaian, serta target tahunan mulai dari tahun 2025 – 2029. Kolom target dan pagu indikator tahunan menunjukkan rencana capaian kinerja yang ingin dicapai setiap tahunnya, yang diiringi dengan estimasi kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan atau sub kegiatan.

Uraian tersebut dapat di lihat pada rincian tabel rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Renstra Dinas Pertanian Lombok Tengah 2025-2029 berikut di bawah ini:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				90.150.801.00 0,00		93.223.563.00 0,00		96.333.149.00 0,00		99.576.805.00 0,00		102.952.597.00 0,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31.773.407.00 0,00		32.856.393.00 0,00		33.952.358.00 0,00		35.095.575.00 0,00		36.285.363.00 0,00		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	25	100	31.773.407.00 0,00	100	32.856.393.00 0,00	100	33.952.358.00 0,00	100	35.095.575.00 0,00	100	36.285.363.00 0,00	3.27.00.00.00.24 .0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				184.000.000,0 0		202.400.000,0 0		222.640.000,0 0		244.904.000,0 0		269.394.400,0 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	184.000.000,0 0	1	202.400.000,0 0	1	222.640.000,0 0	1	244.904.000,0 0	1	269.394.400,0 0		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2		2		2		2		2			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				42.000.000,00		46.200.000,00		50.820.000,00		55.902.000,00		61.492.200,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	42.000.000,00	5	46.200.000,00	5	50.820.000,00	5	55.902.000,00	5	61.492.200,00		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.700,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.700,00		
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.700,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.700,00		
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	3.993.000,00	1	4.392.300,00		
3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.324.000,00		5.856.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00	1	5.324.000,00	1	5.856.400,00		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45.000.000,00		49.500.000,00		54.450.000,00		59.895.000,00		65.884.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	14	45.000.000,00	14	49.500.000,00	14	54.450.000,00	14	59.895.000,00	14	65.884.500,00		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.000.000,00		17.600.000,00		19.360.000,00		21.296.000,00		23.425.600,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	22	16.000.000,00	22	17.600.000,00	22	19.360.000,00	22	21.296.000,00	22	23.425.600,00		
3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.100.000,00	2	13.310.000,00	2	14.641.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.204.407,00		30.630.493,00		31.503.868,00		32.402.236,00		33.988.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	22.204.407,00	0,00	12	30.630.493,00	0,00	12	31.503.868,00	0,00	12	32.402.236,00	0,00	12	33.988.240,10	0,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1			1			1			1			1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	311	311			311			311			311			311		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.150.407,00	0,00		30.571.093,00	0,00		31.438.528,00	0,00		32.330.362,00	0,00		33.909.178,70	0,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	311	311	22.150.407,00	0,00	311	30.571.093,00	0,00	311	31.438.528,00	0,00	311	32.330.362,00	0,00	311	33.909.178,70	0,00
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.000.000,00			15.400.000,00			16.940.000,00			18.634.000,00			20.497.400,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	14.000.000,00		1	15.400.000,00		1	16.940.000,00		1	18.634.000,00		1	20.497.400,00	
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				40.000.000,00			44.000.000,00			48.400.000,00			53.240.000,00			58.564.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	40.000.000,00		12	44.000.000,00		12	48.400.000,00		12	53.240.000,00		12	58.564.000,00	
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				305.000.000,00			335.500.000,00			369.050.000,00			405.955.000,00			446.550.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64	64	305.000.000,00	64	335.500.000,00	64	369.050.000,00	64	405.955.000,00	64	446.550.500,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		8.800.000,00		9.680.000,00		10.648.000,00		11.712.800,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	8.000.000,00	10	8.800.000,00	10	9.680.000,00	10	10.648.000,00	10	11.712.800,00		
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.000.000,00		93.500.000,00		102.850.000,00		113.135.000,00		124.448.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64	64	85.000.000,00	64	93.500.000,00	64	102.850.000,00	64	113.135.000,00	64	124.448.500,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				115.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		168.371.500,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1	1	115.000.000,00	1	126.500.000,00	1	139.150.000,00	1	153.065.000,00	1	168.371.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penggandaan yang Disediakan (Paket)													
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	75.000.000,00	12	82.500.000,00	12	90.750.000,00	12	99.825.000,00	12	109.807.500,00		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.000.000,00		7.700.000,00		8.470.000,00		9.317.000,00		10.248.700,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000,00	1	7.700.000,00	1	8.470.000,00	1	9.317.000,00	1	10.248.700,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.300.000.000,00		830.000.000,00		913.000.000,00		1.004.300.000,00		439.230.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	8.300.000.000,00	1	830.000.000,00	1	913.000.000,00	1	1.004.300.000,00	0	439.230.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00		
3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	8.000.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	0	0,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				365.000.000,00		401.500.000,00		441.650.000,00		485.815.000,00		534.396.500,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	365.000.000,00	12	401.500.000,00	12	441.650.000,00	12	485.815.000,00	12	534.396.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000,00		154.000.000,00		169.400.000,00		186.340.000,00		204.974.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	140.000.000,00	12	154.000.000,00	12	169.400.000,00	12	186.340.000,00	12	204.974.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	225.000.000,00	12	247.500.000,00	12	272.250.000,00	12	299.475.000,00	12	329.422.500,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415.000.000,00		456.500.000,00		502.150.000,00		552.365.000,00		607.551.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	415.000.000,00	2	456.500.000,00	2	502.150.000,00	2	552.365.000,00	2	607.551.500,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	180	180		180		180		180		180			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	180	180	220.000.000,00	180	242.000.000,00	180	266.200.000,00	180	292.820.000,00	180	322.102.000,00		
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000,00		214.500.000,00		235.950.000,00		259.545.000,00		285.449.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	195.000.000,00	2	214.500.000,00	2	235.950.000,00	2	259.545.000,00	2	285.449.500,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				34.054.900,00		35.215.650,00		36.390.310,00		37.615.616,00		38.890.837,00		
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3,00	3,07	34.054.900,00	3,09	35.215.650,00	3,10	36.390.310,00	3,12	37.615.616,00	3,15	38.890.837,00	3.27.0.00.0.00.24 .0000 - DINAS PERTANIAN	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	5,00	5,05		5,07		5,09		5,10		5,12			
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	2,00	2,05		2,07		2,09		2,10		2,15			
	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	5,00	5,05		5,07		5,09		5,10		5,15			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				24.054.900,00		24.215.650,00		24.290.310,00		24.305.616,00		24.249.837,00		
Terawasainya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	12	12	19.054.900,00	12	18.715.650,00	12	18.240.310,00	12	17.650.616,00	12	16.929.337,00		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				19.054.900,00		18.715.650,00		18.240.310,00		17.650.616,00		16.929.337,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasanya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	12	12	19.054.900.000,00	12	18.715.650.000,00	12	18.240.310.000,00	12	17.650.616.000,00	12	16.929.337.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	200.000	200.000	5.000.000.000,00	200.000	5.500.000.000,00	200.000	6.050.000.000,00	200.000	6.655.000.000,00	200.000	7.320.500.000,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				5.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.050.000.000,00		6.655.000.000,00		7.320.500.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	200.000	200.000	5.000.000.000,00	200.000	5.500.000.000,00	200.000	6.050.000.000,00	200.000	6.655.000.000,00	200.000	7.320.500.000,00		
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		12.100.000.000,00		13.310.000.000,00		14.641.000.000,00		
Terkendali dan Terawasanya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	10.000.000.000,00	1	11.000.000.000,00	1	12.100.000.000,00	1	13.310.000.000,00	1	14.641.000.000,00		
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		12.100.000.000,00		13.310.000.000,00		14.641.000.000,00		
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	10.000.000.000,00	1	11.000.000.000,00	1	12.100.000.000,00	1	13.310.000.000,00	1	14.641.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				16.009.440.000,00		16.555.117.000,00		17.107.333.000,00		17.683.358.000,00		18.282.848.000,00		
Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	37.225,19	37.225,19	16.009.440.000,00	37.225,19	16.555.117.000,00	37.225,19	17.107.333.000,00	37.225,19	17.683.358.000,00	37.225,19	18.282.848.000,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		878.460.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	44.067	44.067	300.000.000,00	44.067	330.000.000,00	44.067	363.000.000,00	44.067	399.300.000,00	44.067	439.230.000,00		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	44.067	44.067	300.000.000,00	44.067	330.000.000,00	44.067	363.000.000,00	44.067	399.300.000,00	44.067	439.230.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		12	300.000.000,00	12	330.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		12	300.000.000,00	12	330.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				15.409.440,00		15.895.117,00		16.381.333,00		16.884.758,00		17.404.388,00		
Terbangunnya Prasarana Pembangunan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	15	15	15.409.440,00	15	15.895.117,00	15	16.381.333,00	15	16.884.758,00	15	17.404.388,00		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				1.488.834.783,00		1.535.760.097,00		1.582.737.488,00		1.631.377.585,00		1.681.583.382,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	3	1.488.834.783,00	3	1.535.760.097,00	3	1.582.737.488,00	3	1.631.377.585,00	3	1.681.583.382,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				4.019.853.913,00		4.146.552.261,00		4.273.391.217,00		4.404.719.478,00		4.540.275.130,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	10	4.019.853.913,00	10	4.146.552.261,00	10	4.273.391.217,00	10	4.404.719.478,00	10	4.540.275.130,00		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				2.977.669.565,00		3.071.520.193,00		3.165.474.976,00		3.262.755.169,00		3.363.166.763,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	2.977.669.565,00	1	3.071.520.193,00	1	3.165.474.976,00	1	3.262.755.169,00	1	3.363.166.763,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				893.300.870,00		921.456.058,00		949.642.493,00		978.826.551,00		1.008.950.029,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	893.300.870,00	1	921.456.058,00	1	949.642.493,00	1	978.826.551,00	1	1.008.950.029,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				6.029.780.869,00		6.219.828.391,00		6.410.086.826,00		6.607.079.217,00		6.810.412.696,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	15	15	6.029.780.869,00	15	6.219.828.391,00	15	6.410.086.826,00	15	6.607.079.217,00	15	6.810.412.696,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				5.172.230.000,00		5.348.524.000,00		5.526.931.000,00		5.713.030.000,00		5.906.710.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	30,00	31,15	5.172.230.000,00	32,50	5.348.524.000,00	35,00	5.526.931.000,00	37,70	5.713.030.000,00	40,00	5.906.710.000,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10,00	10,75		11,00		11,50		11,75		12,00			
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan				100.000.000,00		100.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.350.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota															
Terdatanya jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	693	693	100.000.000,00	693	100.000.000,00	693	121.000.000,00	693	133.100.000,00	693	146.350.000,00			
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				100.000.000,00		100.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.350.000,00			
Terawasanya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	693	693	100.000.000,00	693	100.000.000,00	693	121.000.000,00	693	133.100.000,00	693	146.350.000,00			
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.072.230.000,00		5.248.524.000,00		5.405.931.000,00		5.579.930.000,00		5.760.360.000,00			
Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	8.640	8.640	5.072.230.000,00	9.000	5.248.524.000,00	9.450	5.405.931.000,00	9.800	5.579.930.000,00	10.000	5.760.360.000,00			
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				5.072.230.000,00		5.248.524.000,00		5.405.931.000,00		5.579.930.000,00		5.760.360.000,00			
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	8.640	8.640	5.072.230.000,00	9.000	5.248.524.000,00	9.450	5.405.931.000,00	9.800	5.579.930.000,00	10.000	5.760.360.000,00			
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				736.000.000,00		761.087.000,00		786.474.000,00		812.956.000,00		840.517.000,00			
Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	30,00	30,75	736.000.000,00	31,00	761.087.000,00	31,50	786.474.000,00	31,75	812.956.000,00	32,00	840.517.000,00	3.27.0.00.0.00.24 .0000 - DINAS PERTANIAN		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	15,00	15,75		16,00		16,50		16,75		17,00				
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				736.000.000,00		761.087.000,00		786.474.000,00		812.956.000,00		840.517.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	1.000	493.120.000,00	1.000	509.928.290,00	1.000	526.937.580,00	1.000	544.680.520,00	1.000	563.146.390,00		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				493.120.000,00		509.928.290,00		526.937.580,00		544.680.520,00		563.146.390,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	1.000	493.120.000,00	1.000	509.928.290,00	1.000	526.937.580,00	1.000	544.680.520,00	1.000	563.146.390,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2.000	2.000	242.880.000,00	2.000	251.158.710,00	2.000	259.536.420,00	2.000	268.275.480,00	2.000	277.370.610,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				242.880.000,00		251.158.710,00		259.536.420,00		268.275.480,00		277.370.610,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2.000	2.000	242.880.000,00	2.000	251.158.710,00	2.000	259.536.420,00	2.000	268.275.480,00	2.000	277.370.610,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				636.000.000,00		657.678.000,00		679.616.000,00		702.500.000,00		726.316.000,00		
Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	10,00	10,75	636.000.000,00	11,00	657.678.000,00	11,50	679.616.000,00	11,75	702.500.000,00	12	726.316.000,00	3.27.0.00.0.00.24 .0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				636.000.000,00		657.678.000,00		679.616.000,00		702.500.000,00		726.316.000,00		
Terlaksananya penerbitan Rekomendasi Teknis Pendukung Usaha Pertanian sesuai SOP	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3	3	636.000.000,00	3	657.678.000,00	3	679.616.000,00	3	702.500.000,00	3	726.316.000,00		
	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Usaha Pertanian (Dokumen)													
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				636.000.000,00		657.678.000,00		679.616.000,00		702.500.000,00		726.316.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3	3	636.000.000,00	3	657.678.000,00	3	679.616.000,00	3	702.500.000,00	3	726.316.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.768.824.000,00		1.829.114.000,00		1.890.127.000,00		1.953.770.000,00		2.020.006.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10,07	16,78	1.768.824.000,00	20,13	1.829.114.000,00	23,49	1.890.127.000,00	26,85	1.953.770.000,00	30,20	2.020.006.000,00	3.27.0.00.0.00.24.0000 - DINAS PERTANIAN	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.768.824.000,00		1.829.114.000,00		1.890.127.000,00		1.953.770.000,00		2.020.006.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	12	12	1.768.824.000,00	12	1.829.114.000,00	12	1.890.127.000,00	12	1.953.770.000,00	12	2.020.006.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	275	275		275		275		275		275			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	292.820.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pertanian di Kecamatan dan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)													
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				1.118.824.000,00		1.114.114.000,00		1.103.627.000,00		1.088.620.000,00		1.068.341.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	275	275	1.118.824.000,00	275	1.114.114.000,00	275	1.103.627.000,00	275	1.088.620.000,00	275	1.068.341.000,00		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	12	12	300.000.000,00	12	330.000.000,00	12	363.000.000,00	12	399.300.000,00	12	439.230.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	12	12	150.000.000,00	12	165.000.000,00	12	181.500.000,00	12	199.650.000,00	12	219.615.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menyusun sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian		
		Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk mengukur seberapa efektif Dinas Pertanian mencapai tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan dalam Renstra. IKU adalah alat ukur yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang digunakan untuk menilai kinerja dan keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis organisasi, dalam hal ini Dinas Pertanian. Melalui IKU, Dinas Pertanian dapat memantau dan mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra telah tercapai. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki 2 (dua) IKU sebagai alat pengukuran target kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029, yakni:

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan
2. Peningkatan Produksi Pertanian.

Adapun rincian target tahunan pencapaian IKU Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	6,14	7,65	8,64	9,00	9,11	9,11	
2	Peningkatan Produksi Pertanian	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pertanian, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan dinas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan produksi pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. IKK ini digunakan sebagai alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai pencapaian target.

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, IKK Dinas Pertanian tahun 2025-2029 terdiri dari 4 (empat) yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Hortikultura;
3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan;
4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan

Adapun rincian target tahunan pencapaian IKK Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
5	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

Sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029, dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah akan mewujudkan tujuan strategis yakni “Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.” Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memiliki sasaran yakni ”Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian.”

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah ini telah memuat permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang kemudian menjadi acuan perumusan program/kegiatan/subkegiatan.

Sesuai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan misi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Untuk penjabaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.